

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Corporate Governance*.

a. Definisi *corporate governance*

Daniri dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) mendefinisikan *corporate governance* sebagai hubungan antara ketiga organ utama perusahaan yakni RUPS, dewan direksi, dewan komisaris. Suasana kemitraan, keseimbangan hubungan dan efektifitas kerja ketiganya tanpa saling intervensi akan sangat penting bagi terciptanya mekanisme *check and balance* (keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan), pengawasan, pertanggungjawaban, dan pengendalian perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Ratnasari (2011), *corporate governance* merupakan sekumpulan hubungan antara perusahaan dan para *stakeholder*-nya (pemegang saham dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perusahaan). *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan

pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut Shleifer dan Vishniy dalam Darmawati dan Rahayu (2005), *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/ kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Menurut dua pakar manajemen Jill Solomon dan Aris Solomon dalam Siswanto dan Aldridge (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh *Board of Directors*) dengan pemegang saham. *Corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggung jawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.

b. Prinsip-prinsip GCG

Daniri dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) mengungkapkan bahwa dalam prinsip GCG terdapat lima unsur, yaitu:

- 1) Keterbukaan informasi (*transparency*). Keterbukaan informasi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi ini sendiri mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.
- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*). Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Kemandirian (*independency*). Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Keadilan (*fairness*). Keadilan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

c. Tujuan *corporate governance*

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, undated: 3) dalam Indriani dan Nurkholis (2002) mengungkapkan bahwa penerapan *corporate governance* ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan internasional.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
- 3) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
- 4) Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan risiko yang dihadapi kreditor.
- 5) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 6) Mengangkat citra perusahaan.

d. Manfaat *Corporate Governance*

Manfaat *corporate governance* dalam Daniri dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007), antara lain:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik, menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

e. Mekanisme *Corporate Governance*.

Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan salah satunya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*corporate governance*). Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan operasional perusahaan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*bondholders*), dari perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer (Schleifer dan Vishniy dalam Siallagan & Machfoedz,

2003). Mekanisme tersebut meliputi mekanisme internal, seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, dan mekanisme eksternal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, dan tingkat pendanaan dengan hutang (*debt financing*).

1) Komite audit.

Komite audit adalah seseorang yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004.

Keberadaan komite audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, bila perusahaan sampel memiliki komite audit maka dinilai 1, jika sebaliknya dinilai 0.

2) Komposisi komisaris independen.

Komisaris dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada RUPS. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, memastikan perusahaan selalu melaksanakan tanggung jawab sosial, dan memantau efektifitas penerapan GCG yang dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian tujuan GCG, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham dapat tercapai.

Vafeas dalam Boediono (2005) mengatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, peranan komposisi dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui

3) Kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar. Menurut Siswanto dan Aldridge (2005) kepemilikan institusional memiliki kemampuan atau peran, yaitu:

- a) Untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.
- b) Sebagai sumber informasi perusahaan yang kredibel bagi investor lain yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka. Informasi dari investor institusional dianggap kredibel jika mereka telah cukup lama menanamkan dananya pada perusahaan yang bersangkutan dan jumlah investasi dana mereka cukup substansial.
- c) Mengajukan suara dalam rapat-rapat pemegang saham (*voting*). Pihak institusional mulai menyadari bahwa *voting* terhadap keputusan penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, merupakan salah satu sarana untuk memonitor kegiatan dewan pengurus dan manajemen perusahaan.

Philippines dalam Siswanto dan Aldridge (2005) mengutarakan salah satu faktor intern perusahaan yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip GCG adalah struktur kepemilikan dan sumber dana operasi perusahaan. Salah satu contoh, fokus utama GCG di negara maju seperti Amerika

Salah satu contoh, fokus utama GCG di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris adalah perlindungan hak dan kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham atau investor institusional.

4) Kepemilikan manajerial

Jansen dan Meckling dalam Siallagan & Machfoedz (2003) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi). Kepemilikan manajerial yang besar dapat mencegah manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, karena dengan adanya saham yang dimiliki oleh manajer maka manajer memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham lainnya.

2. Luas Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Disclosure memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai (Amurwani, 2006).

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian

ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut (Amurwani, 2006).

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Yang paling umum digunakan dari ketiga konsep diatas adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif. Pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap.

Laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham, investor dan kreditur. Lebih jelasnya FASB (1980) dalam SFAC No.1 menyatakan:

Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit dan keputusan sejenis lainnya.

Disamping ketiga pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah dan masyarakat umum, tetapi kesemuanya ini dipandang

sebagai penerima kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Yang menjadi titik berat pengungkapan adalah investor adalah kurangnya pengetahuan akan keputusan yang akan diambil oleh pihak lain diluar investor. Pengambilan keputusan yang dilakukan investor dan kreditur dapat diketahui secara jelas dan teridentifikasi dengan baik. Bagi investor keputusan yang diinginkan adalah membeli – menjual – mempertahankan saham dan keputusan kreditur adalah berkaitan dengan pemberian kredit atau perpanjangan kredit kepada perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan kepada kedua pemakai ini relatif jelas. Sedangkan tujuan pelaporan kepada pegawai, konsumen dan masyarakat umum sulit dirumuskan. Sehingga dianggap bahwa informasi yang berguna bagi investor dan kreditur juga berguna bagi pihak lain.

Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip ini yang sering disebut dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*). Dimana prinsip pengungkapan penuh mengharuskan pengungkapan semua keadaan dan kejadian yang membuat suatu perbedaan bagi pengguna laporan keuangan.

Murni dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan dapat menyebabkan terjadinya tingkat asimetri informasi, dimana asimetri informasi timbul ketika manajemen lebih mengetahui informasi internal

perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Menurut Suwardjono (2005) informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005). Menurut Belkaoui dalam Juniarti dan Sentosa (2009) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) ini dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi, yang akan semakin membantu dalam memahami risiko atas investasi yang mereka lakukan.

Tingkat asimetri informasi yang rendah menunjukkan bahwa semakin berkurangnya informasi yang disembunyikan oleh perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan lebih transparan (Juniarti dan Yunita, 2003). Clarkson *et al* dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan yang transparan menyebabkan estimasi investor atas risiko yang ada pada perusahaan rendah, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor juga rendah, yang pada gilirannya juga akan mengurangi *cost of equity* perusahaan. Dalam mengukur tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) Suropto dalam Juniarti dan Sentosa (2009) telah merumuskan kriterianya menjadi 32item.

3. Konservatisme Akuntansi

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan verifibilitas yang diminta untuk pengakuan laba dibandingkan rugi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikembangkan Basu dalam Anggraini dan Trisnawati (2008) yang mengatakan bahwa konservatisme adalah praktik untuk mengurangi laba dan menurunkan nilai aktiva bersih ketika menghadapi *bad news* akan tetapi tidak meningkatkan laba dan menaikkan nilai aktiva bersih ketika menghadapi *good news*. Lodovicus dalam Kusumawati (2009) memaparkan berbagai definisi konservatisme akuntansi, salah satunya menurut *The Financial Accounting Standards Board* (FASB) yang menggambarkan konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian untuk menjamin bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi bisnis tersebut dikendalikan dengan baik. Penilaian itu kemudian dijabarkan oleh definisi yang menyebutkan bahwa konservatisme merupakan sifat yang dimiliki oleh akuntan untuk bersikap hati-hati (*prudence*) dalam pengakuan suatu kejadian ekonomi. Ryandini (2007), mengungkapkan hal yang sama yaitu konservatisme merupakan reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan.

Literatur-literatur menyebutkan berbagai alasan perusahaan memilih akuntansi konservatif. Foster dalam Dewi (2004) menyebutkan enam alasan yaitu :

- a. Menaati peraturan yang berlaku
- b. Konsistensi pada model akuntansi

- c. Menyajikan keadaan ekonomi yang sebenarnya
- d. Dapat membandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- e. Konsekuensi ekonomi terhadap perusahaan
- f. Konsekuensi ekonomi terhadap manajemen

Kritik terhadap konservatisme akuntansi menyebutkan bahwa penggunaan konservatisme akuntansi menimbulkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan realita (Kusumawati, 2009). Menurut Dewi (2004) metoda konservatif dianggap kurang berkualitas, tidak relevan, dan tidak bermanfaat karena laporan keuangan yang disusun dengan metoda konservatif tidak mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya. Sedangkan pada sisi lain, banyak penelitian yang mengungkapkan manfaat prinsip konservatisme, berdasarkan teori *efficient contracting* menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan pada masa yang akan datang (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Laba konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh oleh perusahaan dimana laba yang disusun bukan merupakan laba yang "dibesarkan" nilainya, sehingga dapat dianggap sebagai laba yang berkualitas (Dewi, 2004). Aktiva dan laba yang bias (semakin rendah) yang dihasilkan akan mencegah tindakan perusahaan untuk membesar-besarkan laba dan aktiva. Dengan demikian, konservatisme membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang *overstate* (Sari, 2003) dan mengurangi sikap oportunitis manajer, sehingga mampu mengurangi konflik kepentingan di seputar kebijakan deviden.

1. Pengukuran Konservatisme

Pengukuran Konservatisme menurut Watts (2003) menyatakan dalam artikelnya, terdapat tiga ukuran konservatisme yaitu:

a. *Earnings/stock return relation measures*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan baik perubahan atas rugi ataupun laba dalam nilai *asset-stock return* tetap berusaha untuk melaporkannya sesuai dengan waktunya. Pengukuran ini biasa dikenal dengan pengukuran “Model Basu”. Basu dalam Sari dan Adharini (2009) memprediksikan bahwa pengembalian saham dan *earnings* cenderung merefleksikan kerugian dalam periode yang sama, tetapi pengembalian saham merefleksikan kerugian dalam periode yang sama dan juga pengembalian saham merefleksikan keuntungan lebih cepat daripada *earnings*. Pengukuran konservatisme akuntansi dengan model Basu (1997) dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut:

$$EPS/P = \beta_0 + \beta_1 NEG_t + \beta_2 RET + \beta_3 RET * NEG + \varepsilon$$

Dalam persamaan tersebut, EPS merupakan Earnings Per Share perusahaan sampel dan P adalah harga saham pada awal periode. NEG menunjukkan *return* saham *negative* dan berupa variabel dummy yang ditunjukkan dengan angka 0, sedangkan RET merupakan *return* negatif yang juga merupakan variabel dummy dan diberikan skor 1. Untuk mengetahui adanya konservatisme akuntansi dalam persamaan tersebut ditunjukkan dengan koefisien β_3 .

Richard (2009) dalam penelitiannya menyatakan, regresi akuntansi laba (EPS / P) pada return saham (R) secara terpisah untuk *goodnews* dan *badnews* perusahaan. Tahun perusahaan dianggap sebagai *goodnews* jika pengembalian sahamnya memiliki *return positif* atau nol. Demikian juga, sebuah tahun perusahaan dianggap sebagai *badnews*, jika pengembalian sahamnya memiliki *return negative*. Dengan menggunakan variabel dummy, model Basu memungkinkan koefisien kemiringan berbeda antara *goodnews* dan kelompok *badnews* (β_0 , β_1 , β_2 , β_3 untuk koefisien masing-masing *goodnews* dan *badnews*).

b. *Earnings/accrual measures*

1) Model Givoly dan Hayn (2000)

Ukuran konservatisme yang kedua ini menggunakan akrual yaitu selisih antara *net income* dan *cash flow*. Menurut Sari dan Adharini (2009), *net income* yang digunakan adalah *net income* sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan adalah *cash flow operasional*. Dalam pengukuran model Givoly dan Hayn ini kecenderungan dilihat dari akun akrual selama beberapa tahun. Givoly membagi akrual menjadi dua, yaitu *operating accrual* yang merupakan jumlah akrual yang muncul dalam laporan keuangan sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan dan *non operating accrual* yang merupakan jumlah akrual yang muncul diluar hasil kegiatan operasional perusahaan.

a) *Operating Accruals*

Semakin besar akrual negatif yang diperoleh maka semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Sehingga laporan laba rugi yang konservatif akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut akan segera dibebankan pada periode tersebut dibandingkan menjadi cadangan (biaya yang ditangguhkan) pada neraca (Sari, 2003). Rumus dari proksi konservatisme ini adalah sebagai berikut:

$$CONACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$CONACC_{it}$ = tingkat konservatisme

NI_{it} = *net income* sebelum *extraordinary item* ditambah depresiasi dan amortisasi.

CF_{it} = *cash flow* dari kegiatan operasional.

Hasil perhitungan CONACC di atas dikalikan dengan -1, sehingga semakin besar konservatisme ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai CONACC.

b) *Non-operating Accrual*

Non Operating Accrual berdasarkan literatur *Criterion Research Group*, dinyatakan bahwa *Non Current (operating) accrual* menangkap perbedaan dalam *non-current asset*, investasi non ekuitas jangka panjang bersih, dikurang perubahan dalam *non-current liabilities* hutang jangka panjang bersih. Komponen *non operating accrual* yang terdapat pada sisi asset yang utama adalah aktiva tetap dan aktiva tetap tidak berwujud. Pada sisi

kewajibannya terdapat sebuah varietas dari akun-akun seperti utang jangka panjang, penangguhan pajak dan *postretirement benefits* yang juga merupakan manifestasi atas estimasi dan asumsi subjektif.

Givolly dan Hayn dalam Sari dan Adharini (2009) menyatakan bahwa apabila akrual bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif yang disebabkan karena laba lebih rendah dari *cash flow* yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu.

2) *Discretionary Accruals*

Dechow (1995), Sweeny (1995), dan Healy and Wahlen (1999) dalam Sari dan Adharini (2009) menyatakan bahwa *Discretionary Accruals* (akrual diskresioner) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya manipulasi laba yang dilakukan manajemen.

Pilihan manajemen atas prosedur atau metoda akuntansi, apapun hipotesis yang melandasinya dapat mengarah pada laporan yang konservatif atau optimis. Perbedaan industri serta preferensi manajer atas motivasi memilih prosedur akuntansi menimbulkan pendapat bahwa ada berbagai tingkatan konservatisme yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan. Jika manajemen melakukan hal-hal tersebut karena niat, bukan karena kondisi yang menghendaki perubahan *judgment* dan metode akuntansi serta pergeseran biaya dan pendapatan, maka hal tersebut adalah akrual diskresioner. Hal itu didukung dengan kenyataan bahwa standar akuntansi yang berlaku mengizinkan untuk memilih berbagai metoda yang dapat diterapkan dalam kondisi/transaksi yang sama, sehingga memungkinkan

perusahaan untuk memilih metoda yang dirasa paling tepat diterapkan dalam perusahaan tertentu. (Dewi, 2004).

Menurut Sari dan Adharini (2009), *non-discretionary accrual* adalah kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan kondisi perusahaan, seperti penyesuaian peningkatan pendapatan perusahaan sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap estimasi tingkat piutang tak tertagih dan perbaikan terhadap pabrik dengan penyesuaian kembali estimasi umur pabrik.

c. *Net Asset Measures*

Ukuran ketiga digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement* (Sari dan Adharini, 2009). Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan.

4. *Cost of Debt*

Pada saat pengambilan keputusan keuangan, hal yang harus dilakukan adalah mencari sumber dana yang optimal. Perusahaan mempunyai dua sumber utama dalam usaha untuk memperoleh pendanaan yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal yaitu modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan; diperoleh dari penyusutan dan laba ditahan yang diperoleh perusahaan dari pengelolaan aset-asetnya. Sedangkan sumber dana eksternal merupakan modal atau dana yang diperoleh dari luar perusahaan, yakni dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan (modal saham

biasa dan saham istimewa) atau dari kreditur (hutang bank, obligasi, *commercial paper*, dan hutang dagang). Pemilihan komposisi ini disebut sebagai keputusan struktur modal. Pendanaan eksternal membutuhkan struktur modal yang memadai setiap waktu, baik dari investor maupun kreditor.

Menurut Goldon Donalson dalam Haruman (2007), asimetri informasi akan mendorong perusahaan untuk menggunakan hutang, bukan menerbitkan saham baru. Hal tersebut dikarenakan para pemodal akan melihat bahwa penerbitan saham baru dinilai sebagai sinyal yang buruk, biaya modal pun akan tinggi dan menurunkan nilai perusahaan. Akan tetapi sebagai gantinya, perusahaan akan memberikan return kepada kreditur. Tingkat pengembalian inilah yang akan menjadi *cost of debt* (biaya hutang) bagi perusahaan.

Menurut Fabozzi dalam Juniarti dan Sentosa (2009), *cost of debt* (biaya hutang) didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan oleh kreditur atau tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan. Biaya hutang yang meliputi tingkat bunga harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman.

Menurut Singgih (2008), *cost of debt* adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Biaya hutang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Francis, Khurana, dan Pereira dalam Juniarti dan Sentosa (2009) juga menggunakan *interest rate* dari hutang perusahaan untuk menghitung besarnya

cost of debt yang diterima perusahaan. *Cost of debt* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$COD = \frac{\text{interest expense}}{\text{average interest bearing debt}}$$

Cost of debt didapat dari besarnya beban bunga (*interest expense*) yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman (*average interest bearing debt*) yang menghasilkan bunga tersebut.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Komisaris independen dan *cost of debt*

Tugas seorang komisaris independen adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan *corporate governance*, sehingga akan memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan memberi masukan bagi direksi. Anderson, Mansi, dan Reeb (2003) meneliti pengaruh komisaris independen dengan *cost of debt* pada 500 indeks produksi di *Lehman Brother Fixed Income (LBFI)* dan *Standard & Poor's (S&P)* pada 31 Desember 1992. Hasilnya menyatakan bahwa *cost of debt* berbanding terbalik dengan komisaris independen. *Bondholders* akan mempertimbangkan keefektifan pengawasan atas dewan dan komite audit sebagai jaminan atas integritas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur memberikan pengurangan *return* pada perusahaan. Dengan kata lain semakin besar proporsi komisaris independen, maka *cost of debt* perusahaan semakin kecil. Dalam penelitian Piot & Piere (2007), menggunakan komisaris independen sebagai mekanisme *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan mempengaruhi *cost of debt*. Susiana dan Herawaty

(2007) menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki komisaris independen, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan dan akan membuat kinerja manajemen meningkat. Kinerja manajemen yang baik dapat menurunkan risiko perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang didapat sebagai berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*.

2. Kepemilikan manajerial dan *cost of debt*

Kepemilikan manajerial memiliki peranan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan investor serta kreditur, sehingga dapat menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anderson, Mansi, Reeb (2005) menunjukkan bahwa debtholders secara signifikan memintai risk premium yang lebih rendah pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Manajemen yang memiliki sebagian saham akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan hutang untuk mengurangi risiko perusahaan. Cara untuk menurunkan risiko perusahaan adalah dengan menurunkan tingkat hutang yang dimiliki perusahaan. Christiawan dan Tarigan (2007) menyatakan bahwa hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahaan akan mengalami *financial distress*. Oleh karena itu maka manajer akan berusaha menekan jumlah hutang serendah mungkin dengan menekan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam struktur

kepemilikan saham, membuat kreditur melihat kinerja manajemen yang lebih baik, bila perusahaan dinilai baik dan risiko rendah, maka *cost of debt* yang dikeluarkan perusahaan sebagai *return* yang diminta kreditur akan rendah. berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dibentuk:

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*.

3. Kepemilikan institusional dan *cost of debt*

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun berupa kepemilikan lembaga yang lain. Peran pihak institusional dalam perusahaan adalah dengan memberikan pengawasan kinerja manajemen serta mengurangi tingkat informasi asimetri antara manajemen dan investor maupun kreditur. Bhojraj dan Sengupta (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional lebih besar dan *control* yang kuat akan menikmati *bond yields* yang lebih rendah dan rating yang tinggi pada penerbita *bond* yang baru. Penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Mandelker dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menunjukkan hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan kesejahteraan pemegang saham. Hal tersebut menjadi sinyal yang baik bagi investor dan kreditur dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan. Juniarti dan Sentosa (2009) meneliti pengaruh kepemilikan institusional dengan *cost of debt* pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2003-2007. Hasilnya menunjukkan kepemilikan institusional dapat mengurangi *cost of debt* yang diminta oleh kreditur.

Kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang berarti sebagai tindakan *monitoring* yang dilakukan kepada pihak manajemen. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme *control* terhadap pihak manajemen sehingga kreditur memandang risiko perusahaan rendah, maka akan menurunkan *return* yang akan diminta. Sehingga hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*.

4. Kualitas audit dan *cost of debt*

Susiana dan Herawaty (2007) dalam penelitiannya menggunakan kualitas audit yang diwakili oleh ukuran KAP sebagai variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Semakin besar ukuran KAP yang digunakan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi integritas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Hal ini membantu perusahaan untuk meyakinkan investor dan kreditur bahwa perusahaan lebih transparansi dalam memberikan informasi. Anderson, Mansi, dan Reeb (2003) meneliti pengaruh komite audit dengan *cost of debt* pada 500 indeks produksi di *Lehman Brother Fixed Income (LBFI)* dan *Standard & Poor's (S&P)* pada 31 Desember 1992. Hasilnya komite audit berhubungan dengan *cost of debt* secara signifikan lebih rendah. Penelitian Juniarti dan Sentosa (2009) yang menghubungkan kualitas audit dengan *cost of debt* pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2003-2007, menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Semakin besar kualitas audit, maka *cost of debt*

perusahaan semakin kecil. Hal ini karena audit yang dilakukan oleh KAP *big-four* yang tergolong sebagai KAP berukuran besar lebih berkualitas karena adanya unsur kehati-hatian di dalam yang dilatarbelakangi oleh reputasi auditor yang sudah terpercaya di mata masyarakat. Dengan menggunakan KAP *big-four* untuk melakukan audit atas perusahaan, diharapkan kreditur akan memberikan kepercayaan atas integritas laporan keuangan sehingga *cost of debt* yang diterima perusahaan rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya adalah:

H₄: Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*.

5. Luas pengungkapan sukarela dan *cost of debt*

Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan juga merupakan salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap *public* dalam hal penyampaian informasi laporan keuangan yang relevan. Sengupta (1998) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari tingkat luas pengungkapan sukarela terhadap *cost of debt* dengan memperhitungkan kondisi ketidakpastian pasar. Mengingat bahwa pendanaan hutang merupakan sumber pendanaan eksternal yang penting bagi perusahaan dibandingkan dengan pendanaan ekuitas, maka akan mendorong pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan. Sidarta dan Juniarti (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas *disclosure* terhadap biaya hutang. Hasilnya, terdapat pengaruh negatif signifikan antara kualitas *disclosure* terhadap biaya hutang. Dengan menyajikan laporan keuangan dan *disclosure* yang rinci, jelas dan tepat waktu, akan mengurangi persepsi resiko kegagalan yang akan dibebankan pada perusahaan dan mengurangi *cost of debt*. Hastuti (2008) melakukan pengujian

untuk melihat pengaruh kualitas *disclosure* dengan *cost of debt* pada perusahaan perbankan yg terdaftar di BEJ pada tahun 2005. Hasilnya terdapat pengaruh negatif antara kualitas *disclosure* terhadap *cost of debt*. Setiap perubahan kenaikan atau penurunan yang terjadi pada kualitas *disclosure* akan sangat berarti untuk mempengaruhi *cost of debt*. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan dengan kualitas *disclosure* yang memadai akan memberi gambaran kinerja perusahaan yang akan menjadikan dasar pertimbangan bagi pihak *lenders* dan *underwriters* pada waktu mengestimasi resiko kegagalan. Adanya resiko kegagalan yang harus dipertimbangkan membuat pihak-pihak pemakai informasi melakukan perhitungan terhadap tingkat kemampuan perusahaan dalam pengembalian hutang yang diberikan. Dengan demikian, kualitas *disclosure* pada akhirnya akan berpengaruh terhadap *cost of debt*, sehingga dapat dibentuk hipotesis:

H₅: Luas pengungkapan sukarela berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*.

6. Konservatisme akuntansi dan *cost of debt*

Penelitian Ahmed *et al.* dalam Safiq (2010) mendokumentasikan bahwa konservatisme menurunkan *cost of debt* peminjam. Zhang dalam Safiq (2010) menguji manfaat konservatisme bagi pemberi pinjaman, dimana *cost of debt* diganti dengan *interest rate*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi pinjaman menawarkan *interest rate* yang lebih rendah bagi peminjam yang konservatif. Pelaporan yang konservatif kepada kreditur akan memberikan sinyal yang lebih tepat waktu dalam penyampaian *default risk* perusahaan. Dengan

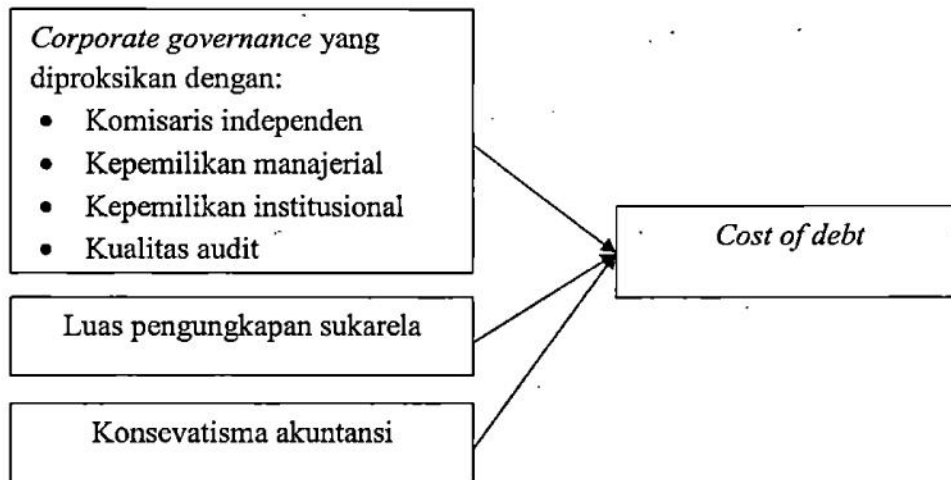
demikian kreditur akan memperoleh manfaat yang besar dari manajemen yang lebih konservatif, sehingga kreditur akan menurunkan *cost of debt* yang diminta.

Hipotesis yang dibentuk adalah:

H₆: Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*.

C. Model Penelitian

Variabel Utama



Gambar 2.1
Gambar Model Penelitian